

**OPTIMALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
PADA DINAS PERHUBUNGAN DI KABUPATEN GOWA**

WAHYUNINGSI ABDULLAH

105610546415



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

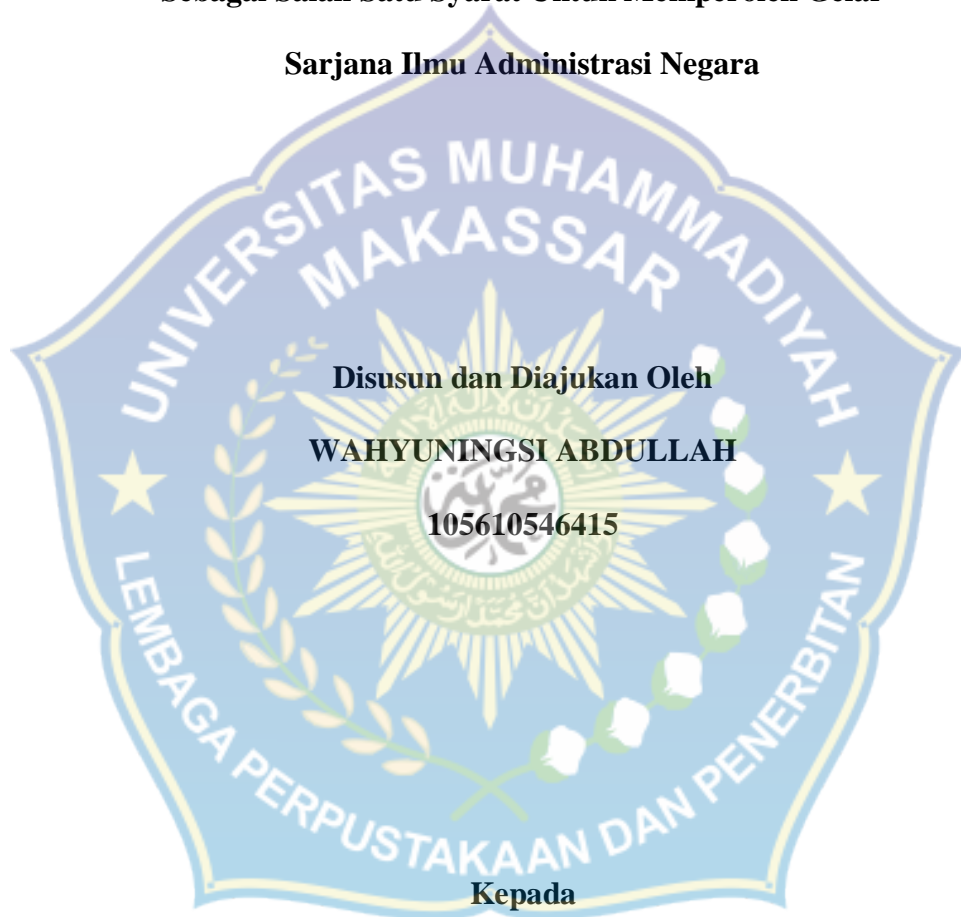
2019

**OPTIMALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
PADA DINAS PERHUBUNGAN DI KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara



**Disusun dan Diajukan Oleh
WAHYUNINGSI ABDULLAH
105610546415**

Kepada

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas
Perhubungan Di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Wahyuningsi Abdullah

Nomor Stambuk : 105610546415

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Alvas, MS


Dr. Jaelan Usman, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Nasrul Haq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor Surat : 0055/FSP/A.4-II/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada Hari Senin Tanggal 30 bulan September Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



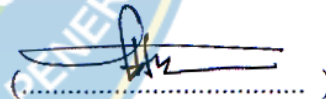
Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si



Dr.Burhanuddin. S.Sos.,M.Si

Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)
2. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M,Si
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



(.....)



(.....)



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Wahyuningsi Abdullah

Nomor Stambuk : 105610546415

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 16 September 2019

Yang Menyatakan,



Wahyuningsi Abdullah

ABSTRAK

Wahyuningsi Abdullah, 2019. Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa Skripsi,. Dibimbing oleh (Alyas dan Jaelan Usman)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui untuk mengetahui Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fokus penelitian ini adalah Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu kepala bidang kasi terminal dan perparkiran, kepala bidang sarana prasarana kasi manajemen rekayasa lalu lintas, dan Juru Parkir. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa sudah terlaksana dengan optimal karena pencapaian realisasi terhadap target sudah berjalan dengan baik yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dengan salah satu pengawasan perparkiran dalam pemungutan retribusi dengan baik dan dengan melakukan pemungutan langsung yang dikoordinir oleh koordinator lapangan. Bertujuan untuk memenuhi apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam memperkuat proses pemungutan retribusi. Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan tercapainya target dan realisasi yang sesuai dengan target yang ditentukan. Dengan demikian pencapaian retribusi daerah dari tahun 2016 sampai 2018 sudah optimal dengan baik.

Kata Kunci : *Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa**”. Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian skripsi ini dijadikan sebagai proses pembelajaran dan pengalaman.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materi maupun non materi. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayah tercinta **Abdullah, SH, MH** dan Ibunda **Nur milu, SH, M.Ap** tercinta yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi dan senantiasa mendoakan dengan tulus untuk kebaikan penulis serta ucapan terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Alyas, MS** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Jaelan Usman, M.Si** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini. Rasa terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi pengaruh kepada penulis selama ini yaitu :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak NasrulHaq, S.Sos, M. dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Anwar Parawangi M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, dan motivasi untuk penyelesaian Studi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan Ilmunya selama proses perkuliahan serta Staf Tata Usaha yang telah banyak membantu Penulis.
6. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah memberikan izin meneliti dan membantu dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi.
7. Saudara/ saudari tercinta Kakak Sitti Fatima, Kakak Nur Fitra SH , Kakak Ilham Maulana Saleh SH, Adik Qhaerunnisa sahabuddin, Adik Muhammad Ramadhan Abdullah , Adik Adik Abdul Rahmat Abdullah, Adik Nur Rahma Abdullah , Adik Nur Alam Abdullah , yang telah memberikan Doa dan Motivasi untuk penulis.
8. Yang selalu menemani mulai dari awal sampai akhir Muhammad Ashar H yang telah memberikan Doa , Bantuan ,dan Motivasi.

9. Sahabat ku Novita Aprilia T , Gusti Ayu checia , Novianti , Ulfa Rahayu , Nur Reski Ramadhani, Widya Aprilianti yang telah memberikan Doa dan motivasi untuk penulis.
10. Sahabat dan teman seperjuangan Muh asrar As, yansar , Sittie Nur fatiehah, Nurhikma, kasmira, Nur nikamat , dan Ayu sri Wulandari. Dan teman-teman kelas F atas semangat dan bantuannya serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu- persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama ini dengan pahala terbaik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu, kritik dan saran sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Makassar, 16 September 2019



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim Penguji.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Konsep, dan Teori	7
B. Kerangka Pikir.....	21
C. Fokus Penelitian	22
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	24
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	25
D. Informan Penelitian.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	26
G. Pengabsahan Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian	29

B. Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa.....	43
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	----

LAMPIRAN	
-----------------------	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan Negara dan pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai sistem Negara kesatuan Otonomi diadakan bukan sekedar untuk menanggung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Masalah penting di daerah otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah Negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa di tunjang kemampuan keuangan daerah berkaitan lemahnya instrument di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah.

Pelayanan publik segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang terkait dengan kepentingan publik. Mengayomi dan melayani masyarakat merupakan fungsi utama penyelenggara pemerintahan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 9, yakni Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yakni pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Pajak daerah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang Seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, dengan demikian, pajak pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Tahun	Retribusi Parkir	
	Realisasi	Target
2011	Rp. 60.000.000,00	Rp. 60.000.000,00
2012	Rp. 81.000.000,00	Rp. 60.000.000,00
2013	Rp. 81.000.000,00	Rp. 80.000.000,00
2014	Rp. 95.000.000,00	Rp. 80.000.000,00
2015	Rp. 99.000.000,00	Rp. 90.000.000,00

Tabel 1.1 : Realisasi dan target Retribusi parkir dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kab. Gowa Tahun 2011-2015

Berdasarkan data hasil penelitian Andi Nurul Azizah dengan judul “Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa” yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dapat dipaparkan dari tahun 2011-2015 retribusi parkir

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi dari tahun 2016 hingga sekarang masih menjadi problem karena adanya ketidaksesuaian antara target dengan realisasi dan adanya titik lokasi retribusi berbeda dengan data yang ada di Dinas Perhubungan.

Penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten gowa berdasarkan masalah dalam berita TRIBUN TIMUR tentang pendapatan asli daerah parkir yang berada dibawah tanggung jawab dinas perhubungan Kabupaten Gowa, Robby Harun mengatakan Kenapa tidak, PAD parkir di 2017 ini hanya mencapai Rp 90 Juta hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2017 berjalan, anggota dewan mempertanyakan jumlah tersebut. “ Masa hanya Rp 90 Juta. Saya waktu rapat dengan DISHUB, tidak saya liat itu laporannya, gowa ini daerah yang besar coba hitung, berapa bank digowa. Di batas kota saja sudah berapa lahan parkir yang saya hitung coba hitung pasar, ada berapa masa sekabupaten Gowa hanya 21 titik, ujarnya Rabu (29/11). Sehingga penerimaan dan kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap penerimaan daerah belum optimal.

Optimalisasi retribusi pelayanan parkir di Kabupaten merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung seimbang, yang terdapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, yang menjadi kendala di kabupaten gowa terkhususnya dalam pemungutan jasa retribusi parkir masih belum terlaksana dengan optimal.

Pentingnya penelitian ini untuk lebih meningkatkan optimalisasi penerimaan retribusi parkir terhadap penyelenggaraan retribusi, pelayanan parkir ditepi jalan umum khususnya di Kabupaten Gowa berjalan dengan optimal, sehingga penerimaan terhadap kontribusi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum terhadap penerimaan retribusi dalam tercapainya tujuan yang optimalisasi.

Melalui pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka judul penelitian ini adalah “Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah utama penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Optimalisasi Retribusi Pelayanan parkir pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui Optimalisasi Retribusi Pelayanan parkir pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap melalui hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi dunia perguruan tinggi khususnya jurusan ilmu administrasi Negara guna untuk mengembangkan lebih luas dan mendalam tentang Optimalisasi Retribusi Pelayanan parkir pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah kabupaten gowa pada dinas perhubungan dengan adanya Optimalisasi Retribusi Pelayanan parkir dapat dijadikan sebagai acuan untuk melangkah lebih baik didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Konsep Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya anggaran daerah atau anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002:9). Sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Yani (2009) APBD sendiri merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja. Untuk menjamin APBD disusun secara baik dan benar, maka perlu diatur landasan administrasi dalam mengelola anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertitip dan taat asas. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam rangka penyusunan anggaran daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang secara rasional yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut:

- a. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
- b. Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.
- c. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendalian untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu Negara.

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah, yang kemudian kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Adanya pemisahan ini bertujuan agar dapat memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur oleh peraturan pemerintah ini adalah memberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan piutang dan utang, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Dalam hal ini instansi yang mengatur pengelolaan investasi, pengelolaan keuangan daerah adalah bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah memiliki tugas untuk menyelesaikan segala proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, dan pemegang kas kecil tersebut harus bertanggungjawab dalam pengelolaan data yang jumlahnya dibatasi.

2. Konsep Optimalisasi

Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling mengutamakan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan. Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat tsuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Menurut Poerdwadarminta dalam Azizah (2016) optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut Winardi (2004) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi merupakan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Optimalisasi menurut Machfud Sidik berkaitan dengan optimalisasi suatu tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. optimalisasi pemungutan retribusi atau pajak menurut Machfud Siddik (2009:9) yaitu: (1) memperluas basis penerimaan, (2) memperkuat proses pemungutan,(3)

meningkatkan pengawasan,(4) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,(5) meningkatkan kapasitas penerimaan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak diperlukan dari sistem pelayanan pajak yang dilaksanakan cenderung tidak optimal. Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi yaitu suatu proses melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan target sehingga dapat meningkatkan kinerja yang optimal.

Elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi yaitu tujuan, alternative keputusan dan sumber daya yang dibatasi.

- a. Tujuan bisa dibentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan dan penerimaan. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.
- b. Alternative Keputusan merupakan pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang

dimiliki pengambilan keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

- c. Sumber daya yang dibatasi merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterlibatan ini mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Manfaat optimalisasi untuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai dengan baik dengan cara mengatasi suatu masalah dalam pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat dilakukan dan diandalkan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dalam proses produksi untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam penyusunan rencana produksi ini akan menjadi landasan dalam melakukan produksi. Optimalisasi merupakan suatu proses produksi dengan cara untuk memaksimalkan hasil produksi sehingga rencana produksi atau target produksi dapat dicapai dengan tepat atau optimal.

3. Konsep Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Retribusi daerah adalah salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, untuk dapat meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2011:100), Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagian pembayaran atas

pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa retribusi merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atas penyediaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut Siahan (2005:5), Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Dari uraian diatas dapat diketahui Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki pokok sebagai berikut: (1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang, (2) Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, (3) Imbalan dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi dan juga dapat dipaksakan, (4) Pelaksanaan bersifat ekonomis.

Jenis – jenis Retribusi Daerah

1. Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Salah Jenis retribusi jasa umum yaitu Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi tempat khusus parkir.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan tertentu yaitu Retribusi izin mendirikan bangunan, Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, Retribusi izin gangguan, dan Retribusi izin trayek.

Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus membuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek

retribusi. Subjek dari retribusi merupakan orang atau pribadi yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari retribusi daerah. Menurut ketentuan pasal 1 angka 64 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selajutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktivitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

4. Konsep pelayanan.

a. Pengertian Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah, instansi pemerintah adalah sebuta kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementrian, departemen, lembaga pemerintah non departeman, sekretariat lembaga tinggi dan tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah Lainnya Badan Usaha Milik Negara Dan Badan Usaha Milik Daerah.

Menurut Ridwan dalam Inggawati (2013) pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemrintah sebagai penyelenggara Negara terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sediri dan memiliki

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sementara itu menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No,63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara dalam hal ini Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelayanan publik, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah masyarakat.

Widodo (2001:269) menyatakan pelayanan merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi Negara. Oleh karena itu pelayanan publik oleh birokrasi publik harus dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan professional.

Menurut Taliziduhu dalam Bambang (2016) menyatakan bahwa layanan dapat diartikan sebagai produk dan dapat juga diartikan sebagai cara atau alat

yang digunakan oleh provider (penyedia layanan) dalam memasarkan atau mendistribusikan produknya. Jika barang dan jasa dianggap sebagai produk (komoditi), maka perdagangannya dapat disertai dengan layanan sebagai cara atau alat. Yang dimaksud dengan layanan dalam pengertian di atas adalah sebagai produk. kemudian, bagaimana halnya dengan layanan jasa publik? dari segi konseptual, pengertian pelayanan publik dapat ditelusuri melalui istilah layanan civil. Istilah civil berasal dari kata latin civil (kata sifat), yaitu segala sesuatu yang menyangkut kehidupan sehari-hari warga Negara diluar urusan militer dan ibadah.

Prosedur pelayanan merupakan rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk Flow Chart (bagan alir) yang dipandang dalam ruang pelayanan.

Bagan alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi sebagai berikut:

- a. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan.
- b. Informasi bagi penerima pelayanan.
- c. Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan,
- d. Pendorong terwujudnya system dan mekanisme kerja efektif dan efisien.

- e. Pengendalian (Kontrol) dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja.

Lokasi pelayanan harus jelas. Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika. Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, dapat membentuk unit pelayanan terpadu atau pos-pos pelayanan di kantor kelurahan/desa/kecamatan serta di tempat-tempat strategis lainnya.

b. Asas-asas pelayanan publik

asas-asas pelayanan sebagai berikut:

- a) Transparansi dalam penyelenggaraan yang terbuka.
- b) Akuntabilitas pertanggungjawaban pelayanan.
- c) Kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
- d) Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam pelayanan publik
- e) Kesamaan hak tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan satu sama lain.

5. Konsep Retribusi Parkir

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

badan, jadi retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotr dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan diparkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir.

Beberapa definisi parkir sebagai berikut:

- a. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.
- b. Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi, atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil, dan lain-lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

Subjek Dan Wajib Parkir

Subjek retribusi jasa umum tersebut dalam peraturan daerah kabupaten gowa No 09 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 1 yaitu Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir ditepi jalan umum.

Wajib retribusi termuat dalam peraturan daerah Kabupaten Gowa No 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum pasal 4 ayat 2 yaitu wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi parkir ditepi jalan umum.

Subyek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum. Sedangkan subyek retribusi tempat khusus parkir yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir sementara subyek retribusi perijinan penyelenggaraan parkir swasta adalah orang atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa perijinan.

Berbicara tentang Objek retribusi parkir sama halnya dengan sarana dan prasarana fisik perparkiran. Keadaan lingkungan sekitar merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Fasilitas fisik atau bukti fisik yang dalam hal ini adalah sarana dan prasaran yang digunakan dalam pemberian pelayanan parkir. Contoh sarana dalam pelayanan parkir seperti peralatan kantor, atribut juru parkir, identitas diri, dan karcis parkir. Sedang prasarana segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (fasilitas penunjang/pendukung). Contoh prasaran dalam pelayanan parkir seperti kedung PD parkir, titik/lahan parkir, kendaraan operasional, marka parkir,perparkiran yang ada di lokasi-lokasi pemungutan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut.

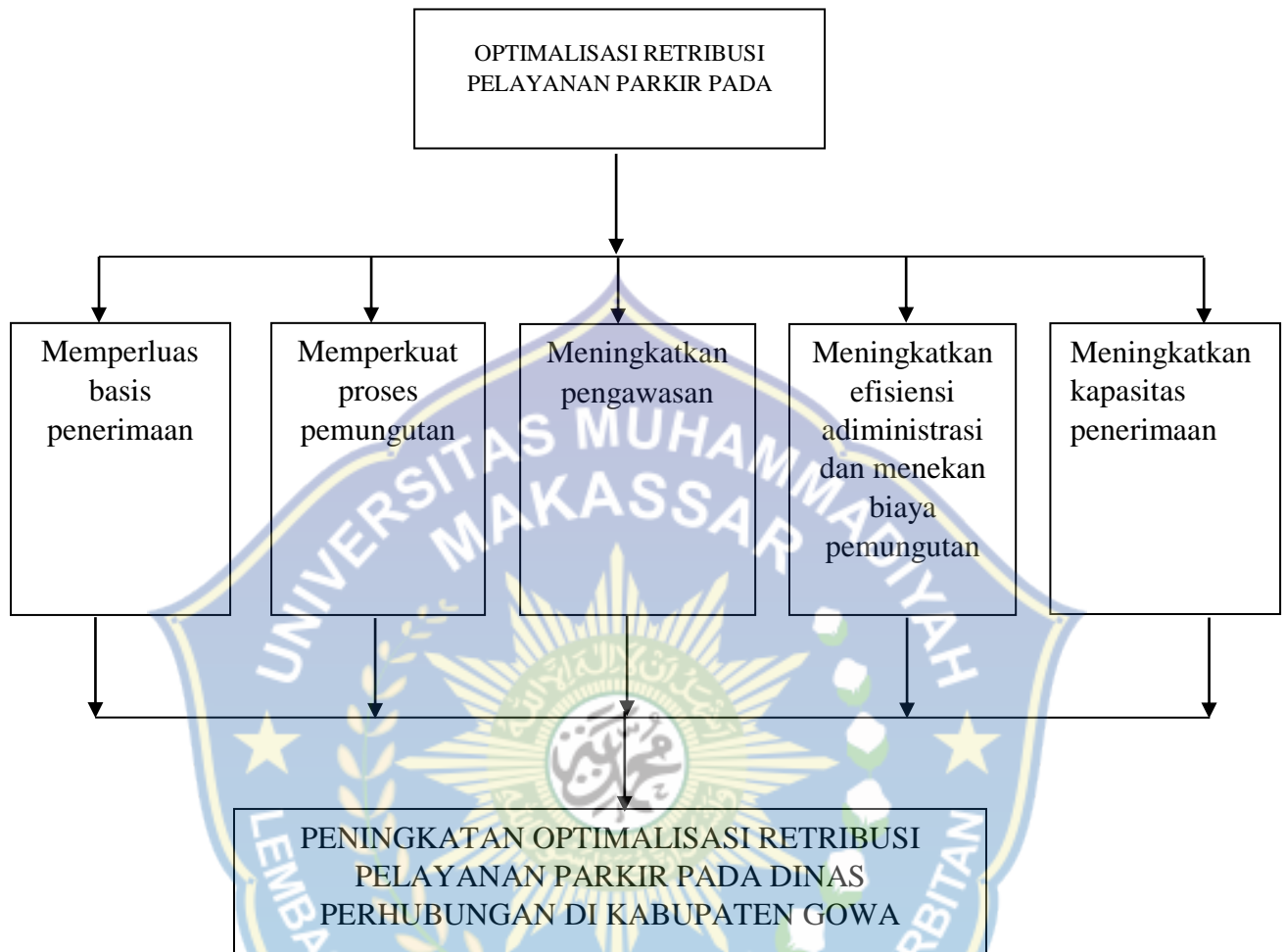
Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa. Permasalahan yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir tidak sesuai dengan jumlah titik lokasi yang ada dengan jumlah yang diterima oleh dinas Perhubungan Kabupaten Gowa. Optimalisasi pemungutan retribusi atau pajak Menurut Siddik (2009:9) yaitu: (1) memperluas basis penerimaan, (2) memperkuat proses pemungutan,(3) meningkatkan pengawasan,(4) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,(5) meningkatkan kapasitas penerimaan. Hasil dari pada penelitian ini diharapkan ada peningkatan optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada dinas perhubungan di Kabupaten Gowa.



Bagan Kerangka Pikir 2.1



C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah optimalisasi Retribusi pelayanan parkir yaitu (1) memperluas basis penerimaan, (2) memperkuat proses pemungutan, (3) meningkatkan pengawasan, (4) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, (5) meningkatkan kapasitas penerimaan. terhadap penyelenggaraan retribusi, pelayanan parkir pada di Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Memperluas basis penerimaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dengan cara mengidentifikasi pembayaran retribusi baru, jumlah pembayaran retribusi, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pemungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan , upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dalam memperkuat proses pemungutan dengan cara mengubah tarif retribusi dan peningkatan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pengawasan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan pemeriksaan secara berskala di Lokasi parkir, menerapkan sanksi terhadap penunggakan retribusi.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan dengan cara memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi dan meningkatkan pengoptimalan terhadap pemungutan retribusi.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan, Dinas Perhubungan kabupaten Gowa dengan cara meningkatkan kegiatan yang dikerjakan oleh pihak untuk mencapai tujuan dengan instansi terkait di daerah. .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Gowa dengan jangka waktu 26 Juni s/d 24 Agustus 2019 yang difokuskan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.. Alasan penelitian ini karena peneliti melihat adanya permasalahan pelaksanaan pelayanan retribusi parkir yang ada di Kabupaten Gowa berdasarkan masalah parkir liar yang menimbulkan retribusi parkir semakin sulit untuk distabilkan, sehingga harus dibenahi mulai dari persoalan pengelolaan dana

retribusi parkir agar retribusi parkir agar retribusi pelayanan yang diinginkan dapat tewujud dengan semestinya.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan mendeksripsikan makna data-data yang berkaitan, agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara jelas tentang optimalisasi retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian a), yaitu:

1. Data Primer data yang diperoleh secara langsung pada saat dilakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data dalam penelitian ini berupa titik-titik lokasi parkir,
2. Data sekunder data yang diperoleh dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari sumber- sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer berupa Sturuktur Organisasi, VIsi-Misi, dan penerimaan PAD yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti maka dipilih orang yang benar-benar memahami atau berkompoten dalam memberikan informasi serta data yang akurat dan akuntabel mengenai optimalisasi retribusi pelayaran parker di tepi jalan umum pada dinas perhubungan di Kabupaten Gowa. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu

No	Nama	Inisial	Jabatan/ Instansi	Jumlah
1	Andi Arifuddin, B, SE	AA	Kasi manajemen rekayasa lalu lintas	1
2	Hendra sijaya, SE	HS	Kasi terminal & perparkiran	1
3	Anto	AT	Juru Parkir	1
4	Bakri	BR	Juru Parkir	1
5	Asdi Alam	AD	Juru Parkir	1
6	Sukri	SK	Juru Parkir	1
7	Wawan	WW	Juru Parkir	1
JUMLAH				7

sebagai berikut:

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

1. Wawancara

Dilakukan dengan cara peneliti turun langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer tentang informasi terkait masalah penelitian dengan cara tanya jawab dimana peneliti dan informan berhadapan langsung.

2. Dokumentasi

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan

dengan masalah penelitian berupa laporan-laporan, skripsi, buku, surat kabar dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap objek yang mendukung data penelitian mengenai optimalisasi retribusi pelayaran parker di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data yang dilakukan melalui tiga alur yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing and Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ada ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengabsahan Data

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan suatu cara pengumpulan data dengan menggabungkan beberapa cara seperti teknik mengumpulkan data dan sumber data yang ada. Ada tiga macam triangulasi yakni:

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kebenaran sebuah data dilakukan dengan teknik pengecekan data yang sudah didapatkan melalui beberapa sumbernya.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji suatu kebenaran data dilakukan dengan teknik pengecekan data kepada sumbernya yang serupa dengan cara lain atau berbeda. Seperti data yang diperoleh dari observasi, kemudian dicek melalui wawancara dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dipagi hari saat narasumber masih sangat

segarnya, belum banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sehingga akan memberikan data yang benar dan valid sehingga data ini dapat dipercaya.

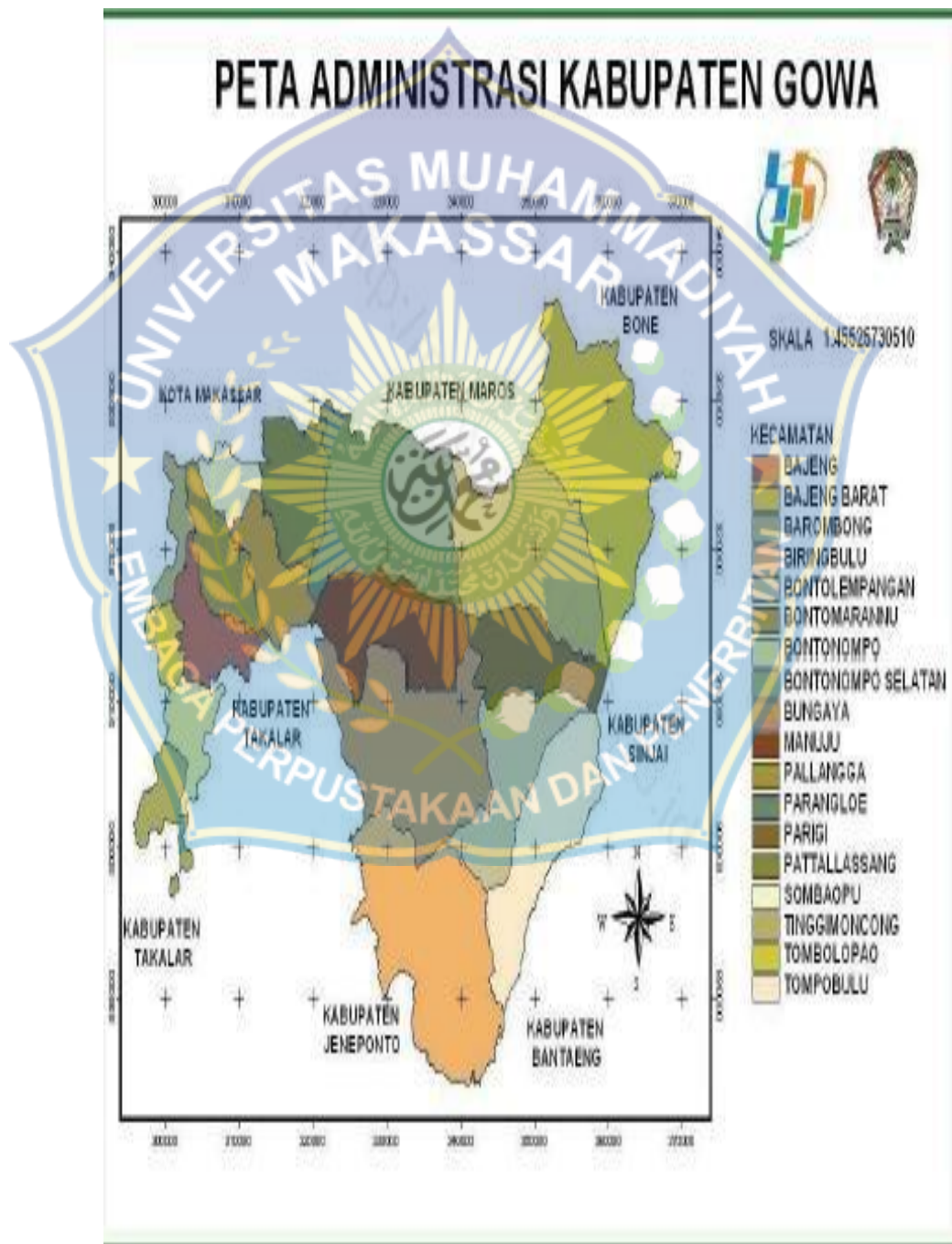


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa



Kabupaten gowa yang berada pada 119,38 BB-120,03 BT dan 5,08 LU dan 5,58 LS, berbatasan dengan kota Makassar dan kabupaten maros di sebelah utara yaitu kabupaten sinjai, bulukumba, dan bantaeng di sebelah timur yaitu kabupaten takalar dan jenepono di seblah selatan yaitu kota Makassar dan kabupaten takalar di sebelah barat. Kabupaten gowa memiliki luas wilayah 1.883,33 kilometer persegi yang sebagian besar wilayahnya berada pada wilayah dataran tinggi, yaitu sebesar 72,26 persen. Sungai terpanjang di kabupaten gowa adalah sungai jeneberang dengan panjang 90 kilometer.

Kabupaten gowa memiliki rata-rata curah hujan 266,42 mili meter persegi pada tahun 2017. Curah hujan tertinggi terletak pada bulan januari, februari dan desember.

Pemerintah kabupaten gowa terdiri dari 18 kecamatan, 167 desa/kelurahan, 675 lingkungan/dusun, 1.546 RK/RW serta 3.530 RT. Jumlah ini tetap sejak tahun 2013. Pada tahun 2015 terdapat pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten gowa yang diadakan setiap 5 tahun sekali, hasilnya adalah adnan purichta IYL, SH terpilih sebagai bupati dan H. Abd Rauf Mallagani, S.Sos, M.Si. sebagai wakil bupati untuk periode 2016-2021.

Tabel 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Gowa Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Bontonompo	30,39	1,61	14
2	Bontonompo	29,24	1,55	9
3	Bajeng	60,09	3,19	14
4	Bajeng Barat	19,04	1,01	7
5	Pallangga	48,24	2,56	16
6	Barombong	20,67	1,10	7
7	Sombaopu	28,09	1,49	14
8	Bontomarannu	52,63	2,79	9
9	Pattalassang	84,96	4,51	8
10	Parangloe	221,26	11,75	7
11	Manuju	91,90	4,88	7
12	Tinggimoncong	142,87	7,59	7
13	Tombolo Pao	251,82	13,37	9
14	Parigi	132,76	7,05	5
15	Bungaya	175,53	9,32	7
16	Bontolempangan	142,46	7,56	8
17	Tompobulu	132,54	7,04	8
18	Biringbulu	218,84	11,62	11
	Jumlah	1.883,33	100,00	167

Sumber: BPS Kabupaten GOWA Tahun 2018

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bontonompo	19.924	21.68	41.604
2	Bontonompo	14.429	15.716	30.145
3	Bajeng	32.574	33.423	65.997
4	Bajeng Barat	11.834	12.431	24.265
5	Pallangga	51.53	52.993	104.523
6	Barombong	18.031	18.524	36.555
7	Sombaopu	68.398	69.544	137.942
8	Bontomarannu	16.401	16.685	33.086
9	Pattalassang	11.515	11.651	23.166
10	Parangloe	8.571	8.967	17.538
11	Manuju	7.248	7.673	14.921
12	Tinggimoncong	11.637	11.801	23.438
13	Tombolo Pao	14.445	14.009	28.454
14	Parigi	6.585	7.274	13.859
15	Bungaya	8.142	8.636	16.778
16	Bontolempangan	6.768	7.348	14.116
17	Tompobulu	14.817	15.857	30.674
18	Biringbulu	16.726	17.522	34.248
	Jumlah	339.57	351.734	691.309

Sumber: BPS Kabupaten GOWA Tahun 2018

Penduduk Kabupaten Gowa tercatat sejumlah 691.309 jiwa yang terdiri dari 339.575 laki-laki dan 351.734 perempuan. Di bawah ini dapat dilihat sebaran penduduk Kabupaten Gowa menurut kecamatan dan jenis kelamin.

Visi Dan Misi Kabupate Gowa Priode 2016-2021

Visi :

“ Terwujudnya masyarakat yang berkualitas mandiri danberdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antara wilayah dan sector.
4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.

2. Gambaran Umum Kantor Dinas Kabupaten Gowa Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gowa.

a. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Dan Informatika Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berdasarkan peraturan pemerintah RI No.8 Tahun 1995 kabupaten gowa ditunjuk sebagai salah satu daerah tingkat II percontohan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang dituangkan dalam pertauran menteri No. 22 Tahun 1990, tentang penyerahan sebagian urusan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada daerah tingkat II.

Konsekuensi dari peraturan RI No. 22 tahun 1990 dan No 8 Tahun 1995, maka dibentuk Dinas lalu lintas dan angkutan jalan, selanjutnya berubah menjadi dinas perhubungan kabupaten gowa berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan peraturan daerah Kabupaten Gowa No. 03 Tahun 2001 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas –dinas kabupaten gowa.

Dinas perhubungan kabupaten Gowa pada Tahun 2008, berubah menjadi dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten Gowa berdasarkan peraturan daerah kabupaten gowa. No Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten gowa (lembaran daerah kabupaten gowa tahun 2008 Nomor 7).

Dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten gowa adalah penggabungan 2 unit kerja pemerintahan Kabupaten Gowa. Dengan berubahnya dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Gowa, maka kantor informasi dan komunikasi dihapus dan sebagian besar urusan atau kegiatan kantor informatika dan komunikasi masuk kedalam struktur organisasi dinas perhubungan komunikasi dan informatika

kabupaten gowa dan sebagian bear lagi bergabung dengan unit kerja yang terkait.

b. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

Visi:

Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan yang handal dan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten gowa.

Misi:

- 1) Mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar.
- 2) Meningkatkan angkutan jalan yang menjangkau seluruh pelosok wilayah.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan.
- 4) Mewujudkan kualitas layanan kesekretariatan.

c. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, bahwa dinas perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perhubungan yang menjai kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Adapun susunan Struktur organisasi dinas perhubungan kabupaten gowa, terdiri atas:

- a. Kepala dinas ;
- b. Sekretariat;

- i. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - ii. Subbagian perencanaan, pelaporan dan keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas;
- 1) Seksi pengujian kendaraan bermotor;
 - 2) Seksi pengawasan dan pengendalian operasional;
 - 3) Seksi bimbingan keselamatan.
- d. Bidang Angkutan;
- 1) Seksi Angkutan orang;
 - 2) Seksi Angkutan Khusus dan Barang ;
 - 3) Seksi Bina Usaha Angkutan.
- e. Bidang teknik sarana dan prasarana
- 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
 - 3. Seksi Terminal dan Perparkiran.

Tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan sesuai dengan peraturan bupati gowa Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas perhubungan kabupaten gowa, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan

perundang- undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas .

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretariat terdiri dari 2 sub bagian yaitu:

- 1) Subbagian umum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian perencanaan, pelaporan dan keuangan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan dalam lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- 3) Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

c. Bidang Lalu Lintas

Bidang lalu lintas terdiri dari 3 seksi yaitu:

- 1) Seksi pengujian kendaraan bermotor;
- 2) Seksi pengawasan dan pengendalian operasional;
- 3) Seksi bimbingan keselamatan.

Bidang lalu lintas dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi pada bidang lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas kepala bidang lalu lintas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang lalu lintas;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang lalu lintas;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

d. Bidang Angkutan

Bidang angkutan terdiri dari 3 seksi yaitu:

- 1) Seksi angkutan orang;
- 2) Seksi angkutan khusus dan barang ;
- 3) Seksi bina usaha angkutan.

Bidang angkutan dipimpin oleh kepala angkutan yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi pada bidang angkutan.

Untuk melaksanakan tugas kepala bidang angkutan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang angkutan;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang angkutan;
 - c) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang angkutan;
 - d) Pelaksanaan administrasi bidang angkutan;
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- e. Bidang teknik sarana dan prasarana

Bidang tehnik sarana dan prasarana terdiri dari 3 seksi yaitu:

- 1) Seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
- 2) Seksi sarana dan prasara lalu lintas;
- 3) Seksi terminal dan perparkiran.

Bidang tehnik sarana dan prasarana dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi pada bidang tehnik sarana dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas kepala bidang tehnik sarana dan prasara mempunyai fungsi:

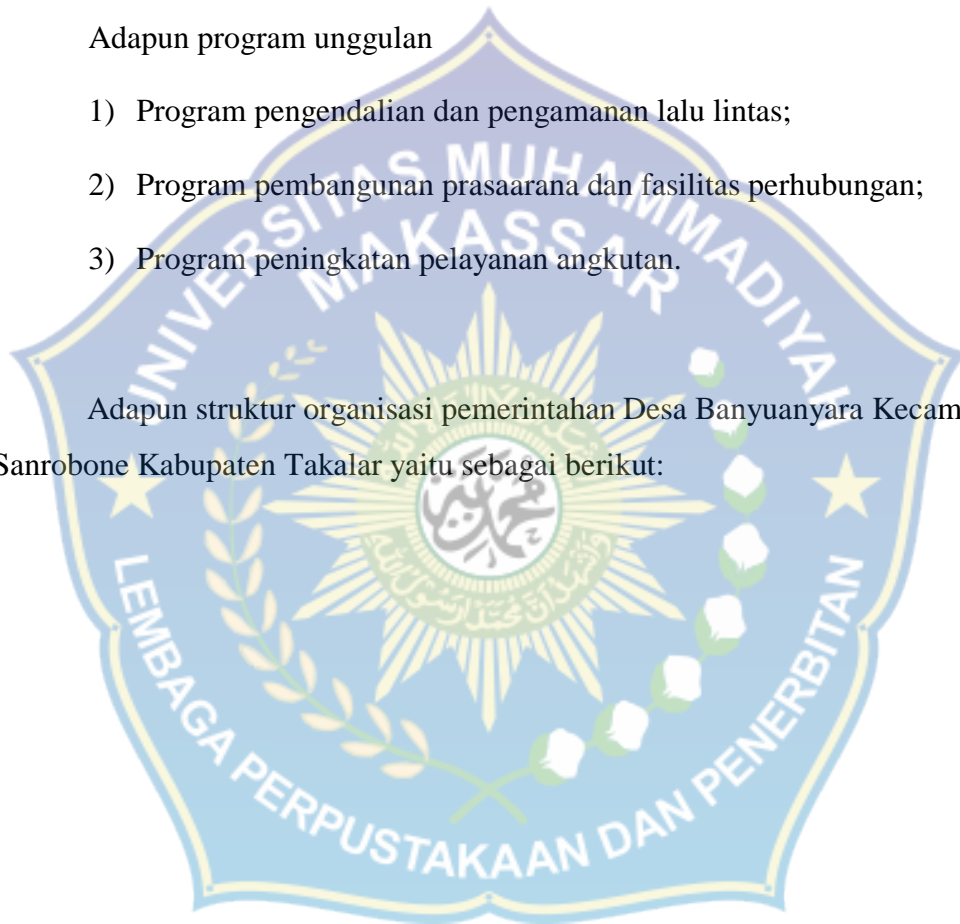
- a) Perumusan kebijakan teknis bidang tehnik sarana dan prasarana;

- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang teknik sarana dan prasarana;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang teknik sarana dan prasarana;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang teknik sarana dan prasarana;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

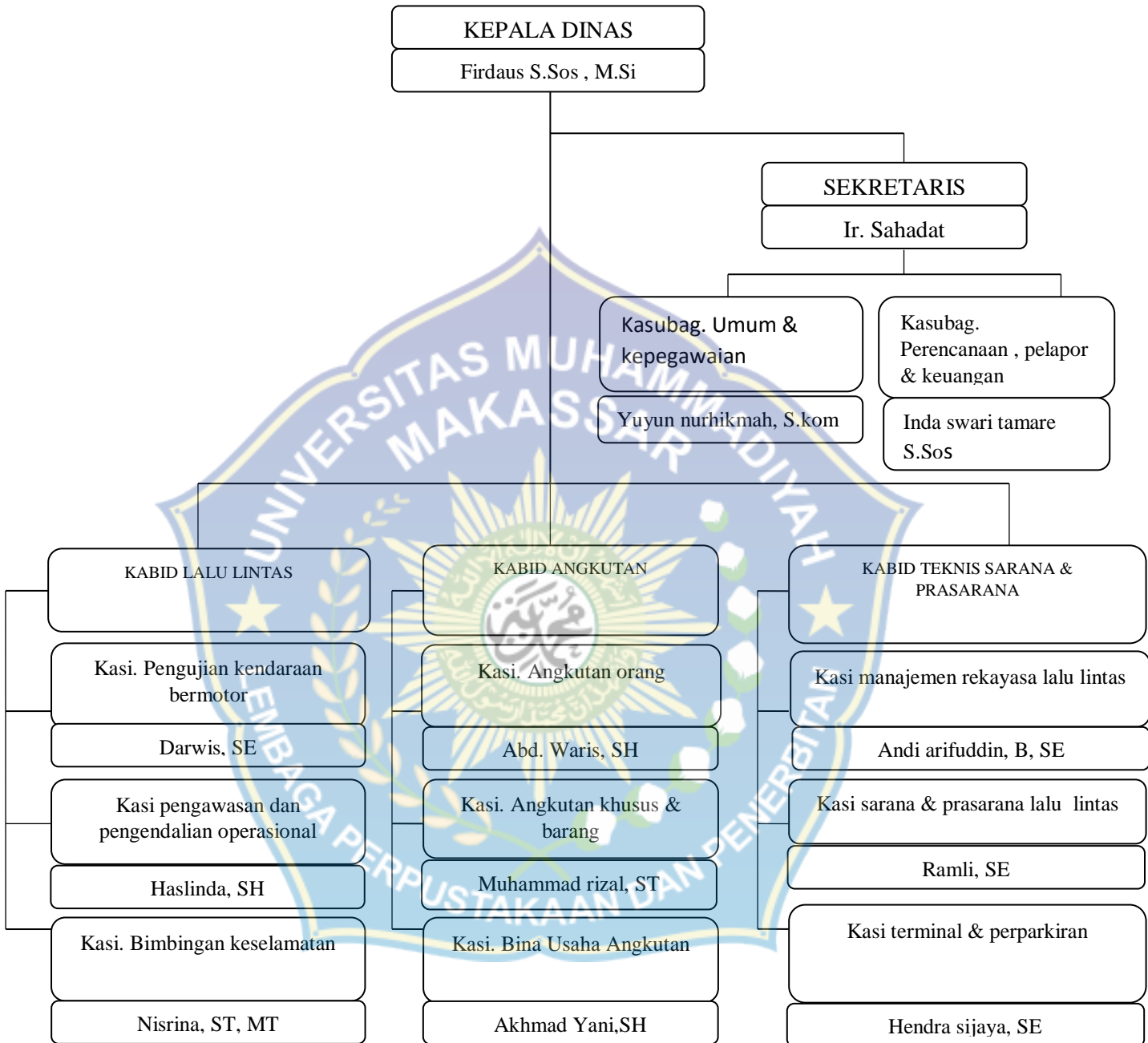
Adapun program unggulan

- 1) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
- 2) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- 3) Program peningkatan pelayanan angkutan.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar yaitu sebagai berikut:



Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten



Tabel 4.3 Titik-Titik Lokasi Pendapatan Potensi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Retribusi Parkir Tepi Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

No	Objek retribusi parkir tepi jalan	Lokasi pemungutan retribusi	Kecamatan
1	Pasar minasa maupa	Jln.Usman salengke	Kec. Somba Opu
2	Toko wang Mart	Jln. Usman salengke	Kec. Somba Opu
3	Toko Istana 82	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
4	Toko Cahaya Oli	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
5	Dunia foto	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
6	Agung jaya motor	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
7	Toko 82	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
8	Toko inti	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
9	Bank Mandiri	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
10	Toko Anugrah	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
11	Toko Edi Sun	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
12	Pasar Rakyat. Sg. Minasa	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
13	Kantor penggadaian	Jln. Habibu Kulle	Kec. Somba Opu
14	Bank BNI	Jln. A. Mallombasa	Kec. Somba Opu
15	Kantor Samsat	Jln. Tumanurung	Kec. Somba Opu
16	Bri/ soto banjar	Jln. Mesjid Raya	Kec. Somba Opu
17	Coto paraikatte	Jln. Mesjid Raya	Kec. Somba Opu
18	Alfamidi	Jln. Mesjid Raya	Kec. Somba Opu
19	Puskesmas somba opu	Jln. Mesjid Raya	Kec. Somba Opu
20	Coffee 36	Jln. Mesjid Raya	Kec. Somba Opu
21	RM. Bubur ayam	Jln. Mesjid Raya	Kec. Somba Opu
22	Kantor PDAM	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
23	Toko Adi Jaya	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
24	Toko sentral Mode	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
25	Lyric Karaoke	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
26	RM. Cobek- cobek	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
27	RM. Kios Aroma	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
28	RM. Sop Saudara	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
29	RM. Kios Delta	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
30	Presiden HP	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
31	RM. Mie titi	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
32	Bank BCA	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
32	RM. Cangkuning	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
33	Bank Mandiri	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
34	RM. Pak Tjomot	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
35	RM. Anging Mamiri	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
36	Adira Finance	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
37	Mie Teddy	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
38	Alfamidi	Jln. Malino	Kec. Somba Opu
39	Bakso Mangalli	Jl. Poros pallangga	Kec. Pallangga
40	Toko indomaret	Jln. Poros pallangga	Kec. Pallangga
41	Toko swalayan pallangga Mas	Jln. Poros pallangga	Kec. Pallangga
42	Puskesmas Pallangga	Jln. Poros pallangga	Kec. Pallangga
43	BRI Unit Pallangga	Jln. Poros pallangga	Kec. Pallangga
44	RS. Thalia Panciro	Jln. Poros – Panciro	Kec. Pallangga
45	Pasar Taipa Le'leng	Jln. Kampili	Kec. Pallangga
46	Pasar paku	Jln. Paku	Kec. Pallangga

47	Pasar kampung parang	Jln .Kampung parang	Kec. Pallangga
48	Pasar limbung	Jln. Poros limbung	Kec bajeng
49	Pasar balang-balang	Jln poros malino	Kec. Bontomarannu
50	Pasar Bu'run- Bu'run	Bu'run- Bu'run	Kec. Pattalassang
51	Pasar malino	Jln. Malino	Kec. Tinggimoncong
52	Pasar paranglompoa	Paranglompoa	Kec. Bontolempangan
53	Pasar bontoloe	Bontoloe	Kec. bontolempangan
54	Pasar bontojai	Bontojai	Kec. Parangloe
55	Pasar lebong	Lebong	Kec. Parangloe
56	Pasar ta'rattang	Ta'rattang	Kec. Biringbulu
57	Pasar borong nga'ra	Borong nga'ra	Kec. Biringbulu
58	Pasar lauwa	Lauwa	Kec. Biringbulu
59	Pasar tala- tala	Tala -tala	Kec. Biringbulu
60	Pasar Karamasa	Karamasa	Kec. Biringbulu
61	Pasar Baturappe	Baturappe	Kec. Biringbulu
62	Pasar biringbulu	Biringbulu	Kec. Biringbulu
63	Alfamidi hj agus salim	Hj agus salim	Kec. Somba Opu
64	BNI Sultan Hasanuddin	Sultan hasanuddin	Kec. Somba Opu
65	Holland bakery	Sultan hasanuddin	Kec. Somba Opu
66	Pasar swadaya	Poros malino	Kec. Somba Opu.
67	Kantor Samsat	Jln Tumanurung	Kec Somba Opu
68	Lapangan sultan hasanuddin	Jln. Tumanurung	Kec Somba Opu
69	Bank BRI	Jln.Andi Mallobasang	Kec. Somba Opu
70	Kfc citra Land	Jln tun abdul Razak	Kec Somba Opu
71	Toko Subur Gowa	Jln. Wahid Hasyim	Kec Somba Opu

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.



B. Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa .

Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perbaikan izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah . artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri , mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber- sumber retribusi perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.

Dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada dinas perhubungan di Kabupaten Gowa. Terdapat 5 item penting untuk mengukur keberhasilan optimalisasi yaitu meliputi : (1) Memperluas Basis Penerimaan , (2) Memperkuat Proses Pemungutan, (3) Meningkatkan Pengawasan, (4) Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menakan biaya Pemungutan, (5) Meningkatkan kapasitas penerimaan. Hasil pengajian terhadap kelima hal tersebut adalah sebagai berikut

1. Memperluas basis penerimaan

Di dalam pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan parkir yang paling utama adalah memperluas basis penerimaan, Memperluas Basis Penerimaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dengan cara mengidentifikasi pembayaran retribusi baru, jumlah pembayaran retribusi, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pemungutan. Dalam pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan parkir dengan memperluas basis penerimaan dalam pemungutan retribusi daerah hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa:

“Dengan melaksanakan survey lokasi-lokasi yang memungkinkan dibuka lokasi parkir yang baru .” (wawancara dengan AA, 04 Agustus 2019).

Hal serupa juga dikemukakan oleh salah satu pegawai kepala seksi terminal dan perparkiran dinas perhubungan kabupaten gowa yang mengatakan bahwa:

“Dengan cara melakukan survey lapangan dan mencari titik-titik lokasi parkir yang baru yang berada dalam wilayah lingkup kabupaten gowa.” (wawancara dengan HS, 4 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara maksud dan tujuan tersebut diketahui bahwa pemerintah dinas perhubungan kabupaen gowa telah melakukan salah satu hal yang sudah semestinya yaitu dengan melakukan survey titik – titik lokasi yang memungkinkan dibukanya lokasi parkir yang baru dalam rangka mengupaya optimalisasi pemungutan retribusi parkir yang tepat dalam

penataan lokasi tempat parkir untuk mengembangkan retribusi daerah yang lebih

No	Objek retribusi parkir tepi jalan	Lokasi pemungutan retribusi	Kecamatan
----	-----------------------------------	-----------------------------	-----------

optimal.

Upaya Dinas Perhubungan dalam memperluas basis penerimaan melalui penambahan titik- titik lokasi tempat parkir di Kabupaten Gowa yang terbagi beberapa kecamatan. Pada Tahun 2016 – 2017 titik –titik lokasi parkir hanya terdapat 21 titik lokasi, sedangkan pada tahun 2018 telah mengalami perluasan titik lokasi parkir yaitu 71 titik lokasi parkir di Kabupaten Gowa. Berikut tabel

No	Objek retribusi parkir tepi jalan	Lokasi pemungutan retribusi	Kecamatan
1	Toko 82	Jln . K.H Wahid H	Kec Somba Opu
2	Toko Inti	Jln . K.H Wahid H	Kec Somba Opu
3	Toko Edi Sun	Jln. K.H Wahid H	Kec Somba Opu
4	Toko wang Mart	Jln. Usman Selengke	Kec Somba Opu
5	Kantor pegadaian	Jln. Habibu Kulle	Kec Somba Opu
6	Toko sentral	Jln. St. Hasanuddin	Kec Somba Opu
7	Puskesmas Sombo Opu	Jln . Mesjid Raya	Kec Somba Opu
8	Toko Adi Jaya	Jln. St. Hasanuddin	Kec Somba Opu
9	RM. Bubur Ayam	jln . Mesjid Raya	Kec Somba Opu
10	RM,Kios Aroma	Jln. St. Hasanuddin	Kec Somba Opu
11	RM. Kios Delta	Jln. St. Hasanuddin	Kec Somba Opu
12	RM. Mie Titi	Jln. St. Hasanuddin	Kec Somba Opu
13	RM. Pak Tjomot	Jln. St. Hasanuddin	Kec Somba Opu
14	RM. Anging Mamiri	Jln. St. Hasanuddin	Kec Somba Opu
15	Mie Teddy	Jln. St. Hasanuddin	Kec Somba Opu
16	RS. Thalia Panciro	Jln. Poros P . Panciro	Kec. Pallangga
17	Toko Indomaret	Jln poros pallangga	Kec Pallangga
18	Pasar Minasa Maupa	Jln. Usman Salengke	Kec Somba Opu
19	Pasar Balang-balang	Jln. Poros Malino	Kec.Bontomarannu
20	Pasar Malino	Malino	Kec.tinggimoncong
21	Pasar Malakaji	Malakaji	Kec. Tompobulu

titik – titik lokasi parkir pada tahun 2016-2018 di Kabupaten Gowa.

Tabel 4.4 titik – titik lokasi parkir pada tahun 2016-2017 di Kabupaten Gowa.

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

1	Pasar minasa maupa	Jln.Usman salengke	Kec. Somba Opu
2	Toko wang Mart	Jln. Usman salengke	Kec. Somba Opu
3	Toko Istana 82	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
4	Toko Cahaya Oli	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
5	Dunia foto	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
6	Agung jaya motor	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
7	Toko 82	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
8	Toko inti	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
9	Bank Mandiri	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
10	Toko Anugrah	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
11	Toko Edi Sun	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
12	Pasar Rakyat. Sg. Minasa	Jln. K.H. Wahid Hasyim	Kec. Somba Opu
13	Kantor penggadaan	Jln. Habibu Kulle	Kec. Somba Opu
14	Bank BNI	Jln. A. Mallombasa	Kec. Somba Opu
15	Kantor Samsat	Jln. Tumanurung	Kec. Somba Opu
16	Bri/ soto banjar	Jln. Mesjid Raya	Kec. Somba Opu
17	Coto paraikatte	Jln. Mesjid Raya	Kec. Somba Opu
18	Alfamidi	Jln. Mesjid Raya	Kec. Somba Opu
19	Puskesmas somba opu	Jln. Mesjid Raya	Kec. Somba Opu
20	Coffee 36	Jln. Mesjid Raya	Kec. Somba Opu
21	RM. Bubur ayam	Jln. Mesjid Raya	Kec. Somba Opu
22	Kantor PDAM	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
23	Toko Adi Jaya	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
24	Toko sentral Mode	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
25	Lyric Karaoke	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
26	RM. Cobek- cobek	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
27	RM. Kios Aroma	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
28	RM. Sop Saudara	Jln. St. Hasanuddin	Kec. Somba Opu
29	RM. Kios Delta	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
30	Presiden HP	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
31	RM. Mie titi	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
32	Bank BCA	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
32	RM. Cangkuning	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
33	Bank Mandiri	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
34	RM. Pak Tjomot	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
35	RM. Anging Mamiri	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
36	Adira Finance	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
37	Mie Teddy	Jln. St. hasanuddin	Kec. Somba Opu
38	Alfamidi	Jln. Malino	Kec. Somba Opu
39	Bakso Mangalli	Jl. Poros pallangga	Kec. Pallangga
40	Toko indomaret	Jln. Poros pallangga	Kec. Pallangga
41	Toko swalayan pallangga Mas	Jln. Poros pallangga	Kec. Pallangga
42	Puskesmas Pallangga	Jln. Poros pallangga	Kec. Pallangga
43	BRI Unit Pallangga	Jln. Poros pallangga	Kec. Pallangga
44	RS. Thalia Panciro	Jln. Poros - Panciro	Kec. Pallangga
45	Pasar Taipa Le'leng	Jln. Kampili	Kec. Pallangga
46	Pasar paku	Jln. Paku	Kec. Pallangga
47	Pasar kampung parang	Jln .Kampung parang	Kec. Pallangga
48	Pasar limbung	Jln. Poros limbung	Kec bajeng
49	Pasar balang-balang	Jln poros malino	Kec. Bontomarannu
50	Pasar Bu'run- Bu'run	Bu'run- Bu'run	Kec. Pattalassang
51	Pasar malino	Jln. Malino	Kec. Tinggimoncong
52	Pasar paranglompoa	Paranglompoa	Kec. Bontolempangan

53	Pasar bontoloe	Bontoloe	Kec. Bontolempangan
54	Pasar bontojai	Bontojai	Kec. Parangloe
55	Pasar lebong	Lebong	Kec. Parangloe
56	Pasar ta'rattang	Ta'rattang	Kec. Biringbulu
57	Pasar borong nga'ra	Borong nga'ra	Kec. Biringbulu
58	Pasar lauwa	Lauwa	Kec. Biringbulu
59	Pasar tala- tala	Tala –tala	Kec. Biringbulu
60	Pasar Karamasa	Karamasa	Kec. Biringbulu
61	Pasar Baturappe	Baturappe	Kec. Biringbulu
62	Pasar biringbulu	Biringbulu	Kec. Biringbulu
63	Alfamidi hj agus salim	Hj agus salim	Kec. Somba Opu
64	BNI Sultan Hasanuddin	Sultan hasanuddin	Kec. Somba Opu
65	Holland bakery	Sultan hasanuddin	Kec. Somba Opu
66	Pasar swadaya	Poros malino	Kec. Somba Opu.
67	Kantor Samsat	Jln Tumanurung	Kec Somba Opu
68	Lapangan sultan hasanuddin	Jln. Tumanurung	Kec Somba Opu
69	Bank BRI	Jln.Andi Mallobasang	Kec. Somba Opu
70	Kfc citra Land	Jln tun abdul Razak	Kec Somba Opu
71	Toko Subur Gowa	Jln. Wahid Hasyim	Kec Somba Opu

Tabel 4.5 Tabel 4.5 titik – titik lokasi parkir pada tahun 2018 di Kabupaten Gowa.

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dalam memperluas basis penerimaan retribusi parkir dengan cara menambahkan titik lokasi parkir. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah mengalami peningkatan jumlah titik lokasi parkir di Kabupaten Gowa.

Hasil pengamatan penulis, terkait indikator memperluas basis penerimaan dalam optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada dinas perhubungan di Kabupaten Gowa (Siddik 2009) sehingga pencapaian memperluas basis penerimaan dalam retribusi parkir telah berjalan dengan optimal.

Pendapatan anggaran selama 3 Tahun (2016-2018). Kantor dinas perhubungan kabupaten Gowa melalui laporan keuangannya memperlihatkan terjadinya peningkatan di setiap tahun. Pendapatan retribusi parkir daerah pada kantor dinas perhubungan kabupaten gowa dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Target Dan Realisasi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2016

Retribusi Parkir Tahun 2016	
Bulan	Retribusi
Januari	Rp 1.000.000
Februari	Rp. 7.400.000
Maret	Rp. 8.100.000
April	Rp. 7.000.000
Mei	Rp 5.000.000
Juni	Rp. 11.500.000
Juli	Rp. 7.000.000
Agustus	Rp. 10.500.000
September	Rp. 11.400.000
Oktober	Rp 8.100.000
November	Rp. 12.500.000
Desember	Rp. 11.500.000
Jumlah	Rp. 101.000.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir setiap bulan mengalami kenaikan maupun penurunan berdasarkan jumlah retribusi setiap bulannya. Terealisasi sejumlah Rp. 101.000.000

Tabel 4.7 Target Dan Realisasi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2017

Retribusi Parkir Tahun 2017	
Bulan	Retibusi
Januari	Rp 1.500.000
Februari	Rp. 9.000.000
Maret	Rp. 12.700.000
April	Rp. 9.500.000
Mei	Rp 10.300.000
Juni	Rp. 5.000.000
Juli	Rp. 4.500.000
Agustus	Rp. 13.000.000
September	Rp. 8.500.000
Oktober	Rp 8.500.000
November	Rp. 9.000.000
Desember	Rp. 15.700.000
Jumlah	Rp. 107.700.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir setiap bulan mengalami kenaikan maupun penurunan berdasarkan jumlah retribusi setiap bulannya. Realisasi target di tahun 2017 sejumlah 107.700.000 rupiah

Tabel 4.8 Target Dan Realisasi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2017

Retribusi Parkir Tahun 2018	
Bulan	Retibusi
Januari	Rp 5.500.000
Februari	Rp. 8.000.000
Maret	Rp. 6.000.000
April	Rp. 18.000.000
Mei	Rp 10.300.000
Juni	Rp. 6.200.000
Juli	Rp. 23.700.000
Agustus	Rp. 10.000.000
September	Rp. 9.700.000
Oktober	Rp 22.400.000
November	Rp. 21.000.000
Desember	Rp. 4.200.000
Jumlah	Rp. 155.000.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir setiap bulan mengalami kenaikan maupun penurunan berdasarkan jumlah retribusi setiap bulannya. Realisasi target di tahun 2018 Sejumlah 155.000.000 rupiah

2. Memperkuat proses pemungutan

Memperkuat proses pemungutan , upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dalam memperkuat proses pemungutan dengan cara mengubah tarif retribusi dan peningkatan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan parkir dengan memperkuat proses pemungutan, memperkuat proses pemungutan retribusi daerah dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Seksi manajemen rekayasa lalu lintas dinas perhubungan kabupaten gowa:

“Dengan melakukan pemungutan langsung yang dilakukan oleh staf dinas perhubungan yang terkhususnya pada seksi perparkiran dan dengan melakukan proses kegiatan pengawasan perparkiran.”(wawancara dengan AA, 04 Agustus 2019).

Hal serupa juga dikemukakan oleh salah satu pegawai kepala seksi terminal dan perparkiran dinas perhubungan kabupaten gowa yang mengatakan bahwa:

“Dengan melakukan pengawasan perparkiran, jelas akan meningkatkan proses pemungutan retribusi dengan baik dengan melakukan pemungutan langsung yang dikoordinir oleh koordinator lapangan.” (wawancara HS, 04 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah yaitu dinas perhubungan kabupaten gowa melakukan pengawasan perparkiran seperti meningkatkan proses pemungutan retribusi dengan baik dan melakukan

pemungutan secara langsung yang dikoordinir oleh koordinator lapangan sebagai upaya dalam memperkuat proses pemungutan retribusi. Dalam pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan parkir dengan memperkuat proses pemungutan, retribusi daerah dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari kepala seksi manajemen rekayasa lalu lintas dinas perhubungan kabupaten gowa:

“ Dari tahun 2016 sampai 2018 target dan realisasi retribusi meningkat dari tahun ketahun.”(wawancara dengan HS 04, Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah dinas perhubungan kabupaten gowa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan tercapainya target yang telah ditetapkan. Dengan demikian pencapaian retribusi daerah dari tahun 2016 sampai 2018 sudah optimal dengan baik.

Pendapatan anggaran selama 3 Tahun (2016-2018). Kantor dinas perhubungan kabupaten Gowa melalui laporan keuangannya memperlihatkan terjadinya peningkatan di setiap tahun. Pendapatan retribusi parkir daerah pada kantor dinas perhubungan kabupaten gowa dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.9 Target Dan Realisasi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2016

Retribusi Parkir Tahun 2016	
Bulan	Retribusi
Januari	Rp 1.000.000
Februari	Rp. 7.400.000
Maret	Rp. 8.100.000
April	Rp. 7.000.000
Mei	Rp 5.000.000
Juni	Rp. 11.500.000
Juli	Rp. 7.000.000
Agustus	Rp. 10.500.000
September	Rp. 11.400.000
Oktober	Rp 8.100.000
November	Rp. 12.500.000
Desember	Rp. 11.500.000
Jumlah	Rp. 101.000.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir setiap bulan mengalami kenaikan maupun penurunan berdasarkan jumlah retribusi setiap bulannya.

Tabel 4.10 Target Dan Realisasi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2017

Retribusi Parkir Tahun 2017	
Bulan	Retibusi
Januari	Rp 1.500.000
Februari	Rp. 9.000.000
Maret	Rp. 12.700.000
April	Rp. 9.500.000
Mei	Rp 10.300.000
Juni	Rp. 5.000.000
Juli	Rp. 4.500.000
Agustus	Rp. 13.000.000
September	Rp. 8.500.000
Oktober	Rp 8.500.000
November	Rp. 9.000.000
Desember	Rp. 15.700.000
Jumlah	Rp. 107.700.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir setiap bulan mengalami kenaikan maupun penurunan berdasarkan jumlah retribusi setiap bulannya.

Tabel 4.11 Target Dan Realisasi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Tahun 2017

Retribusi Parkir Tahun 2018	
Bulan	Retibusi
Januari	Rp 5.500.000
Februari	Rp. 8.000.000
Maret	Rp. 6.000.000
April	Rp. 18.000.000
Mei	Rp 10.300.000
Juni	Rp. 6.200.000
Juli	Rp. 23.700.000
Agustus	Rp. 10.000.000
September	Rp. 9.700.000
Oktober	Rp 22.400.000
November	Rp. 21.000.000
Desember	Rp. 4.200.000
Jumlah	Rp. 155.000.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa. 2018

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi parkir setiap bulan mengalami kenaikan maupun penurunan berdasarkan jumlah retribusi setiap bulannya.

Berdasarkan data penerimaan Retribusi Parkir 3 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Dinas Perhubungan Kabuapten Gowa dalam memperkuat proses penerimaan retribusi parkir telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Dalam pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan parkir dengan memperkuat proses pemungutan retribusi daerah. Adapun tata cara pemungutan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada pasal 13 yaitu (1) pemungutan retribusi dilarang diborongkan, (2) retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan (3) dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langgan. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari juru parkir di salah satu lokasi titik parkir di alfamart sultan hasanuddin :

“saya membayar kepada dinas perhubungan 30 ribu, setiap hari kami setor kepada anggota dishub.”(wawancara dengan AT, 6 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Juru parkir membayarkan setoran parkir tiap hari sebesar RP 30 ribu, kepada anggota dari dinas perhubungan Kabupaten Gowa.

Dalam pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan parkir dengan memperkuat proses pemungutan, retribusi daerah dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari juru parkir di salah satu lokasi titik parkir di sentral mode :

“ saya saya membayar kepada dinas perhubungan 50 ribu, setiap hari kami setor kepada anggota dishub.”(wawancara dengan BR, 06 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Juru parkir membayarkan setoran parkir tiap hari sebesar RP 50 ribu, kepada anggota dari dinas perhubungan Kabupaten Gowa.

“iya ,setoran juru parkir berbeda beda setiap tempat sesuai keramaian yang datang.”(wawancara dengan BR, 06 Agustus 2019).

Dalam pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan parkir dengan memperkuat proses pemungutan, retribusi daerah dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari juru parkir di salah satu lokasi titik parkir di Lyric Karaoke :

“ pembayaran setoran ke kordinator parkir setiap hari 50 ribu , sehari bisa mendapatkan 130 ribu “. (wawancara dengan SK , 22 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Juru parkir membayarkan setoran parkir tiap hari sebesar RP 50 ribu, kepada anggota dari dinas perhubungan Kabupaten Gowa.

Dalam pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan parkir dengan memperkuat proses pemungutan, retribusi daerah dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari juru parkir di salah satu lokasi titik parkir di cobek-cobek:

“ saya membayar kepada dinas perhubungan 10 ribu, setiap hari kami setor kepada anggota dishub.”(wawancara dengan WW, 22 September 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Juru parkir membayarkan setoran parkir tiap hari sebesar RP 10 ribu, kepada anggota dari dinas perhubungan Kabupaten Gowa.

Dalam pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan parkir dengan memperkuat proses pemungutan, retribusi daerah dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari juru parkir di salah satu lokasi titik parkir di Bank BNI Mallombasang:

“ saya membayar kepada dinas perhubungan 40 ribu, kami setor kepada anggota dishub.”(wawancara dengan AD, 22 september 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Juru parkir membayarkan setoran parkir tiap hari sebesar RP 40 ribu, kepada anggota dari dinas perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam memperkuat proses pemungutan , upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dengan melakukan pengawasan perparkiran yang dilakukan 2 kali seminggu patroli guna melihat keadan lokasi perparkiran dan melakukan pemungutan retribusi secara langsung oleh staff Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa. Adanya peningkatan realisasi retribusi melampaui Target.

Upaya Dinas Perhubungan dalam memperkuat proses pemungutan melalui tata cara pemungutan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum pada pasal 13 Berikut tabel titik – titik lokasi parkir pada tahun 2016-2018 di Kabupaten Gowa.

Tabel 4.12 titik – titik lokasi retribusi parkir pada tahun 2017 di Kabupaten Gowa. Kecamatan Somba Opu

No	Objek retribusi parkir tepi jalan	Lokasi pemungutan retribusi	Target PAD 2017
1	Toko 82	Jln . K.H Wahid H	3.000.000
2	Toko Inti	Jln . K.H Wahid H	1.800.000
3	Toko Edi Sun	Jln. K.H Wahid H	3.000.000
4	Toko wang Mart	Jln. Usman Selengke	3.000.000
5	Kantor pegadaian	Jln. Habibu Kulle	2.400.000
6	Toko sentral	Jln. St. Hasanuddin	2.400.000
7	Puskesmas Sombo Opu	Jln . Mesjid Raya	2.400.000
8	Toko Adi Jaya	Jln. St. Hasanuddin	3.000.000
9	RM. Bubur Ayam	jln . Mesjid Raya	3.000.000
10	RM,Kios Aroma	Jln. St. Hasanuddin	1.800.000
11	RM. Kios Delta	Jln. St. Hasanuddin	1.800.000
12	RM. Mie Titi	Jln. St. Hasanuddin	1.800.000
13	RM. Pak Tjomot	Jln. St. Hasanuddin	3.000.000
14	RM. Anging Mamiri	Jln. St. Hasanuddin	3.000.000
15	Mie Teddy	Jln. St. Hasanuddin	1.800.000
16	Pasar minasa Maupa	Jln. Usman Selengke	2.400.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Tabel 4.13 titik – titik lokasi retribusi parkir pada tahun 2017 di Kabupaten Gowa. Kecamatan pallangga , bontomarannu, Tinggimoncong, Dan Tompobulu

No	Objek retribusi parkir tepi	Lokasi pemungutan retribusi	Target PAD 2017
1	RS.Thalia Panciro	Jln . K.H Wahid H	12.000.000
2	Toko Indomaret	Jln . poros pallangga	3.600.000
3	Pasar Balang-Balang	Jln. Bontomarannu	2.400.000
4	Pasar Malino	Malino	3.000.000
5	Pasar malakaji	Malakaji	3.600.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa upaya pemerintah dinas perhubungan kabupaten Gowa dalam memperkuat proses pemungutan melalui rencana yang ditetapkan yaitu jumlah target pemungutan pertahun sehingga dapat mengukur keberhasilan pemungutan retribusi parkir di kabupaten gowa.

No	Objek retribusi parkir tepi jalan	Lokasi pemungutan retribusi	Target PAD 2018
1	Pasar minasa maupa	Jln.Usman salengke	30.000.000
2	Toko wang Mart	Jln. Usman salengke	2.400.000
3	Toko Istana 82	Jln. K.H. Wahid Hasyim	1.800.000
4	Toko Cahaya Oli	Jln. K.H. Wahid Hasyim	-
5	Dunia foto	Jln. K.H. Wahid Hasyim	-
6	Agung jaya motor	Jln. K.H. Wahid Hasyim	-
7	Toko 82	Jln. K.H. Wahid Hasyim	1.800.000
8	Toko inti	Jln. K.H. Wahid Hasyim	1.800.000
9	Bank Mandiri	Jln. K.H. Wahid Hasyim	1.800.000
10	Toko Anugrah	Jln. K.H. Wahid Hasyim	-
11	Toko Edi Sun	Jln. K.H. Wahid Hasyim	2.400.000
12	Pasar Rakyat. Sg. Minasa	Jln. K.H. Wahid Hasyim	-
13	Kantor penggadaian	Jln. Habibu Kulle	2.400.000
14	Bank BNI	Jln. A. Mallombasa	2.400.000
15	Kantor Samsat	Jln. Tumanurung	1.800.000
16	Bri/ soto banjar	Jln. Mesjid Raya	-
17	Coto paraikatte	Jln. Mesjid Raya	-
18	Alfamidi	Jln. Mesjid Raya	-
19	Puskesmas somba opu	Jln. Mesjid Raya	2.400.000
20	Coffee 36	Jln. Mesjid Raya	-
21	RM. Bubur ayam	Jln. Mesjid Raya	1.200.000
22	Kantor PDAM	Jln. St. Hasanuddin	1.800.000
23	Toko Adi Jaya	Jln. St. Hasanuddin	1.800.000
24	Toko sentral Mode	Jln. St. Hasanuddin	2.400.000
25	Lyric Karaoke	Jln. St. Hasanuddin	1.600.000
26	RM. Cobek- cobek	Jln. St. Hasanuddin	1.000.000
27	RM. Kios Aroma	Jln. St. Hasanuddin	2.400.000
28	RM. Sop Saudara	Jln. St. Hasanuddin	1.800.000
29	RM. Kios Delta	Jln. St. hasanuddin	1.200.000
30	Presiden HP	Jln. St. hasanuddin	1.200.000
31	RM. Mie titi	Jln. St. hasanuddin	1.800.000
32	Bank BCA	Jln. St. hasanuddin	1.800.000
33	RM. Cangkuning	Jln. St. hasanuddin	1.200.000
34	Bank Mandiri	Jln. St. hasanuddin	1.200.000
35	RM. Pak Tjomot	Jln. St. hasanuddin	1.200.000
36	RM. Anging Mamiri	Jln. St. hasanuddin	1.200.000
37	Adira Finance	Jln. St. hasanuddin	1.200.000
38	Mie Teddy	Jln. St. hasanuddin	1.200.000
39	Alfamidi hj agus salim	Hj agus salim	-
40	BNI Sultan Hasanuddin	Sultan hasanuddin	-
41	Holland bakery	Sultan hasanuddin	-
42	Pasar swadaya	Poros malino	-
43	Kantor Samsat	Jln Tumanurung	1.800.000
44	Lapangan sultan hasanuddin	Jln. Tumanurung	3.000.000
45	Bank BRI	Jln.Andi Mallobasang	-
46	Kfc citra Land	Jln tun abdul Razak	-
47	Toko Subur Gowa	Jln. Wahid Hasyim	1.800.000

Tabel 4.14 Titik – Titik Lokasi Retribusi Parkir Pada Tahun 2018 Pada Kecamatan Somba Opu Di Kabupaten Gowa.

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa titik lokasi retribusi parkir di Kecamatan Somba Somba Opu berjumlah 47 titik lokasi parkir.

1	Bakso Mangalli	Jl. Poros pallangga	-
2	Toko indomaret	Jln. Poros pallangga	-
3	Toko swalayan pallangga Mas	Jln. Poros pallangga	2.400.000
4	Puskesmas Pallangga	Jln. Poros pallangga	1.800.000
5	BRI Unit Pallangga	Jln. Poros pallangga	1.200.000
6	Rs. Thalia Panciro	Jln. Poros P Panciro	12.000.000
7	Pasar Paku	Paku	1.200.000

Tabel 4.15 Titik – Titik Lokasi Retribusi Parkir Pada Tahun 2018 Pada Kecamatan Pallangga Di Kabupaten Gowa.

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa titik lokasi retribusi parkir di Kecamatan Palangga berjumlah 7 titik Lokasi Retribusi Parkir Di Kabuapten Gowa.

Tabel 4.16 Titik – Titik Lokasi Retribusi Parkir Pada Tahun 2018 Pada Kecamatan Biringbulu Di Kabupaten Gowa.

No	Objek retribusi parkir tepi jalan	Lokasi pemungutan retribusi	Target PAD 2018
1	Pasar ta'rattang	Ta'rattang	1.200.000
2	Pasar borong nga'ra	Borong nga'ra	1.200.000
3	Pasar lauwa	Lauwa	1.200.000
4	Pasar tala-tala	Tala-tala	1.200.000
5	Pasar karamasa	Karamasa	1.200.000
6	Pasar baturappe	Baturappe	1.200.000
7	Pasar biringbulu	Biringbulu	1.200.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa titik lokasi retribusi parkir di kecamatan Biringbulu berjumlah 7 titik lokasi retribusi Retribusi Parkir di Kabupaten Gowa

Tabel 4.17 Titik – Titik Lokasi Retribusi Parkir Pada Tahun 2018 Pada Kecamatan Parangloe Di Kabupaten Gowa.

No	Objek retribusi parkir tepi jalan	Lokasi retribusi pemungutan	Target PAD 2018
1	Pasar bontojai	Bontojai	1.200.000
2	Pasar lebong	Lebong	1.200.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa titik lokasi Retribusi Parkir Di Kecamatan Parangloe berjumlah 2 titik lokasi retribusi Retribusi Parkir di Kabupaten Gowa.

Tabel 4.18 Titik – Titik Lokasi Retribusi Parkir Pada Tahun 2018 Pada Kecamatan Bajeng , Kecamatan Bontomarannu , Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Tinngimoncong, Kecamatan Parigi, Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Bontolempangan Di Kabupaten Gowa.

No	Objek retribusi parkir tepi jalan	Lokasi retribusi pemungutan	Target PAD 2018
1	Pasar limbung	Bajeng	3.600.000
2	Pasar balang-balang	Jln. Poros Malino	3.600.000
3	Pasar Bu' rung-bu' rung	Bu' rung-bu' rung	3.000.000
4	Pasar Malino	Malino	3.600.000
5	Pasar paranglompoa	Paranglompoa	1.200.000
6	Pasar bontoloe	Bontoloe	1.200.000
7	Pasar majannang	Majannang	1.200.000
8	Pasar malakaji	Malakaji	3.600.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa titik lokasi Retribusi Parkir Di berbagai Kecamatan yaitu : Kecamatan Bajeng , Kecamatan Bontomarannu , Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Tinngimoncong, Kecamatan Parigi, Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Bontolempangan berjumlah 8 titik lokasi retribusi Retribusi Parkir di Kabupaten Gowa

Dalam retribusi parkir di Kabupaten Gowa terdapat beberapa titik lokasi parkir yang menjadi tempat pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh dinas perhubungan. Jumlah titik lokasi tersebut adalah 21 titik pada tahun 2016, sampai dengan tahun 2017, dan pada tahun 2018 jumlah titik lokasi parkir menjadi 71 titik lokasi. Dengan meningkatnya jumlah titik lokasi parkir diharapkan mampu menambah pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa .

Tabel 4.19 Titik Lokasi Retribusi Parkir Pada Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah
1	Somba Opu	39.600.000
2	Bontomarannu	2.400.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 21 titik lokasi retribusi parkir pada tahun 2017 di kecamatan Somba Opu merupakan titik Lokasi yang jumlah Retribusi parkir terbanyak di kabupaten gowa pada tahun 2017 sedangkan pada kecamatan bontomarannu merupakan titik lokasi parkir jumlah retribusi parkir terendah dikabupaten gowa pada tahun 2017.

Tabel 4.20 Titik Lokasi Retribusi Parkir Pada Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah
1	Somba Opu	85.400.000
2	Parigi	1.200.000
3	Bontolempangan	1.200.000

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 21 titik lokasi retribusi parkir pada tahun 2018 di Kecamatan Somba Opu merupakan titik Lokasi yang jumlah Retribusi parkir terbanyak di kabupaten gowa pada tahun

2018 sedangkan pada Kecamatan Parigi dan Kecamatan Bontomarannu merupakan titik lokasi parkir jumlah retribusi parkir terendah di kabupaten gowa pada tahun 2018.

Hasil pengamatan penulis, terkait indikator Memperkuat proses pemungutan dalam optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada dinas perhubungan di Kabupaten Gowa (Siddik 2009) sehingga pencapaian Memperkuat proses pemungutan dalam retribusi parkir telah berjalan dengan optimal.

3. Meningkatkan Pengawasan

Meningkatkan pengawasan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan pemeriksaan secara berskala di Lokasi parkir, menerapkan sanksi terhadap penunggakan retribusi. Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan kegiatan dalam kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung berhasilnya suatu kinerja yang telah ditentukan. Dimana pengawasan ini selalu dibutuhkan oleh instansi untuk mengetahui aktivitas yang direncanakan. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari kepala seksi manajemen rekayasa lalu lintas dinas perhubungan kabupaten gowa:

“Dengan melakukan pengawasan terhadap sanksi administratif yang yang terlambat menyetor retribusi lebih jelasnya berpatokan pada Perda Nomor. 09 Tahun 2012 Bab XX pasal 28” tentang sanksi”.(wawancara AA, 16 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap sanksi administratif tersebut berpatokan pada perda Nomor. 09 Tahun 2012 Bab XX pasal 28 tentang sanksi administratif

yang berbunyi yaitu ayat 1(satu) dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Ayat 2 (dua) berbunyi penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Hal serupa juga dikemukakan oleh salah satu pegawai kepala seksi terminal dan perparkiran dinas perhubungan kabupaten gowa yang mengatakan bahwa:

“Dengan Melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap maraknya aksi parkir liar di Kabupaten Gowa dan akan melakukan pendataan ulang petugas juru parkir agar tak memberi ruang bagi jukir liar beroperasi, karena tentu akan menyusahkan masyarakat”.
(wawancara HS 16 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap banyaknya aksi parkir liar yang tidak resmi di Kabupaten Gowa dan dinas perhubungan juga akan melakukan pendataan ulang terhadap juru parkir yang tidak resmi yang membuka lahan-lahan parkir yang ilegal pengawasan ini dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten gowa supaya tidak adanya kesempatan-kesempatan lagi terhadap juru parkir yang illegal, Karena dapat menyusahkan masyarakat.

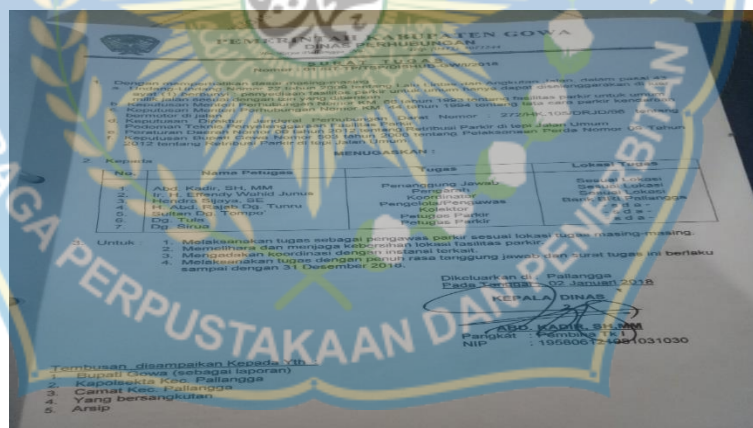
Salah satu pegawai kepala bidang kasi terminal dan perparkiran dinas perhubungan kabupaten gowa yang mengatakan bahwa:

“Pengawasan dilakukan seminggu 2 (duakali) oprasi patroli terhadap juru parkir di lokasi parkir resmi yang terdapat dikabupaten gowa’.(wawancara dengan HS, 16 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dinas perhubungan kabuapten gowa berpatroli seminggu 2 (dua) kali melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang terdapat di Kabupaten Gowa .

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sangat berpengaruh dalam berhasilnya suatu kegiatan yang telah ditentukan dalam suatu aturan. Adapun sanksi yang diberikan terhadap penyimpangan (keterlambatan penyeteroran retribusi parkir) berupa sanksi administratif di kenakan bunga 2 % setiap bulan.

Adapun upaya dinas perhubungan dalam hal meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan.



Gambar 4.1 surat tugas Retribusi Parkir

Berdasarkan gambar di atas surat retribusi parkir sebagai bukti pengawasan yang lakukan oleh dinas perhubungan dalam pemungutan retribusi parkir di kabupaten gowa untuk melaksanakan tugas sebagai pengawasan parkir sesuai lokasi tugas masing-masing, memelihara dan

menjaga kebersihan lokasi fasilitas parkir, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan surat tugas ini berlaku samapai tanggal 31 Desember 2018.

Hasil pengamatan penulis, terkait indikator meningkatkan pengawasan dalam optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada dinas perhubungan di Kabupaten Gowa (Siddik 2009) sehingga pencapaian meningkatkan pengawasan dalam retribusi parkir telah berjalan dengan optimal.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Meningkatkan efisiensi administrasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan dengan cara memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi dan meningkatkan pengoptimalan terhadap pemungutan retribusi. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan dari kepala seksi manajemen rekayasa lalu lintas dinas perhubungan kabupaten gowa:

“Penekanan biaya pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan perda Nomor.09 Tahun 2012”.(wawancara dengan AA, 16 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dinas perhubungan Kabupaten Gowa melakukan penekanan atau penegasan terhadap pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 09 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Bab V tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Pasal 7 yang terdiri dari ayat 1 sampai 3 yaitu (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,

kemampuan masyarakat, aspek keahlian, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) dalam hal penetapan tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya.

Hal serupa juga dikemukakan oleh salah satu pegawai kepala seksi terminal dan perparkiran dinas perhubungan kabupaten gowa yang mengatakan bahwa:

“Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan struktur dan besarnya tariff retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum itu ditetapkan kalau kendaraan roda 2 tarifnya Rp.1000 rupiah sedangkan kendaraan roda 4 dengan tarif Rp.2000. meningkatkan efisiensi administrasi dengan cara meninjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.dengan dilakukannya peninjauan tariff retribusi parkir ditepi jalan umum. dengan memperhatikan perkembangan perekonomian”. (wawancara dengan HS, 16 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dinas perhubungan Kabupaten Gowa melakukan pemungutan dengan struktur dan besarnya tariff retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum itu ditetapkan kalau kendaraan roda 2 tarifnya Rp.1000 rupiah sedangkan kendaraan roda 4 dengan tarif Rp.2000. meningkatkan efisiensi administrasi dengan cara meninjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.dengan dilakukannya peninjauan tariff retribusi parkir ditepi jalan umum.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatkan efisiensi administrasi dan Penekanan biaya pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan perda Nomor.09 Tahun 2012

Pendapatan anggaran selama 3 Tahun (2016-2018). Kantor dinas perhubungan kabupaten Gowa melalui laporan keuangannya memperlihatkan terjadinya peningkatan di setiap tahun. Pendapatan retribusi parkir daerah pada kantor dinas perhubungan kabupaten gowa dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.21 target dan realisasi retribusi parkir dinas perhubungan kabupaten gowa tahun 2016-2018

Tahun	Retribusi Parkir	
	Target	Realisasi
2016	Rp. 90.000.000,00	Rp. 101.000.000,00
2017	Rp. 90.000.000,00	Rp. 107.700.000,00
2018	Rp. 150.000.000,00	Rp. 155.000.000,00

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal meningkatkan kapasitas penerimaan retribusi parkir telah optimal berdasarkan data tiga tahun terakhir yang mengalami peningkatan jumlah penerimaan.

Hasil pengamatan penulis, terkait indikator meningkatkan efisiensi administratif dan menekan biaya pemungutan dalam optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada dinas perhubungan di Kabupaten Gowa (Siddik 2009)

sehingga pencapaian meningkatkan efisiensi administratif dan menekan biaya pemungutan dalam retribusi parkir telah berjalan dengan optimal.

Tabel 4.22 besarnya tariff retribusi dari tahun 2016-2018 sebagai

No	Struktur retribusi parkir	Tarif
1	Kendaraan roda 2 (dua)	Rp. 1000
2	Kendaraan roda 4 (empat)	Rp. 2000

berikuu:

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tarif retribusi parkir yaitu kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp 1000 sedangkan tarif pada kendaraan roda 4 (empat) Rp. 2000.

Hasil pengamatan penulis, terkait indikator meningkatkan efisiensi administratif dan menekan biaya pemungutan dalam optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada dinas perhubungan di Kabupaten Gowa (Siddik 2009) sehingga pencapaian meningkatkan efisiensi administratif dan menekan biaya pemungutan meningkatkan parkir telah berjalan dengan optimal.

5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan

Meningkatkan kepasitas penerimaan, Dinas Perhubungan kabupaten Gowa dengan cara meningkatkan kegiatan yang dikerjakan oleh pihak untuk mencapai tujuan dengan instansi terkait di daerah. Kapasitas merupakan suatu

tingkat kemampuan memproduksi secara optimum dari suatu fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode waktu tertentu.

Mengenai meningkatkan kapasitas penerimaan berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala seksi Terminal dan perparkiran dinas perhubungan kabupaten gowa yang mengatakan bahwa:

“Dengan melakukan perencanaan kedepan tentang pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan untuk bisa dikelola dengan profesional, terkhususnya yang mengenai perparkiran”.(wawancara dengan HS, 16 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan perencanaan kedepannya tentang suatu pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan untuk bisa dikelola dengan profesional terkhususnya yang mengenai perparkiran. Mengenai meningkatkan kapasitas penerimaan berikut hasil wawancara penulis dengan dari Kepala seksi sarana prasarana kasi manajemen rekayasa lalu lintas dinas perhubungan kabupaten gowa:.

“Kapasitas retribusi saat ini sudah berjalan dengan baik karena dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan sesuai target yang ditentukan”. (Wawancara dengan AA, 16 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sudah berhasil mencapai target tiap tahunnya dan terrealisasi dengan baik dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kapasitas penerimaan melakukan perencanaan

kedepannya tentang suatu pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan untuk bisa dikelola dengan profesional , terkhususnya yang menegenai perparkiran dan realisasi sudah berhasil mencapai target tiap tahunnya dengan baik dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang lebih baik.

Tabel 4.23 target dan realisasi retribusi parkir dinas perhubungan kabupaten gowa tahun 2016-2018

Tahun	Retribusi Parkir	
	Target	Realisasi
2016	Rp. 90.000.000,00	Rp. 101.000.000,00
2017	Rp. 90.000.000,00	Rp. 107.700.000,00
2018	Rp. 150.000.000,00	Rp. 155.000.000,00

Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa upaya dinas perhubungan dalam hal meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang ditetapkan seperti pencapaian target setiap tahun yang tercapai dengan optimal sehingga pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan parkir.

Hasil pengamatan penulis, terkait indikator meningkatkan kapasitas penerimaan dalam optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada dinas perhubungan di Kabupaten Gowa (Siddik 2009) sehingga pencapaian

meningkatkan kapasitas penerimaan. Retribusi pelayanan parkir telah berjalan dengan optimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

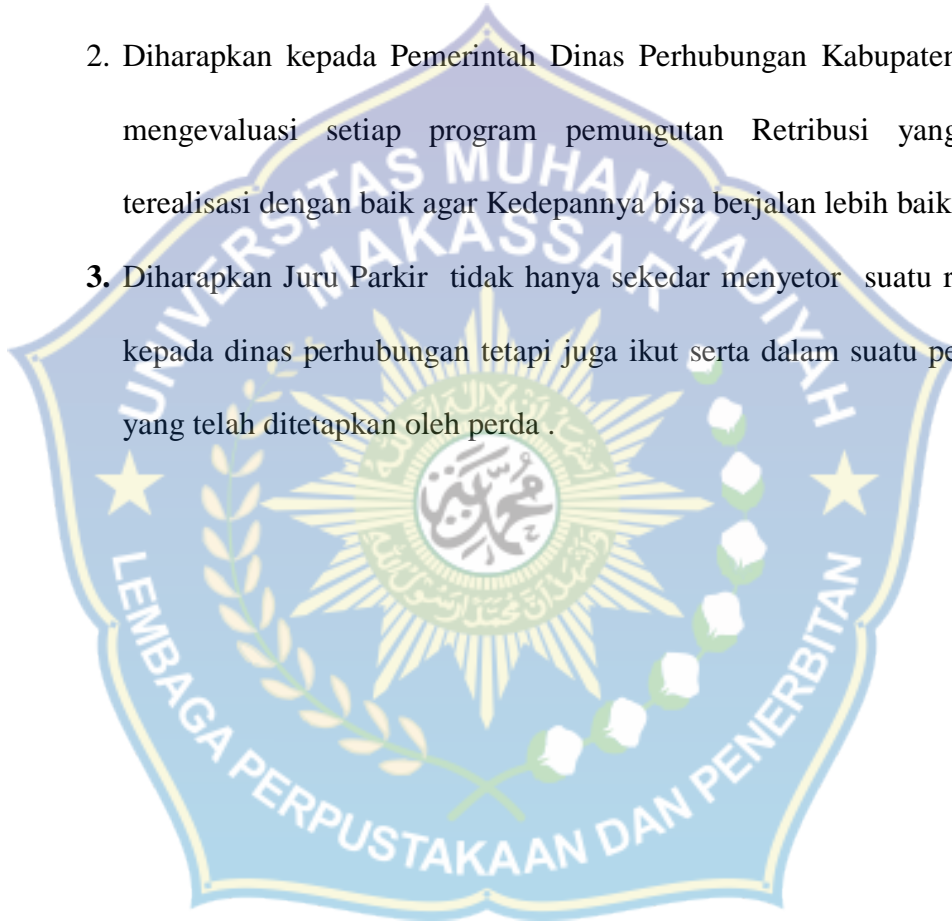
1. Memperluas basis penerimaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa telah melakukan salah satu hal yang sudah semestinya yaitu dengan melakukan survey titik – titik lokasi yang memungkinkan dibukanya lokasi parkir yang baru dalam rangka mengupayakan optimalisasi pemungutan retribusi parkir yang tepat dalam penataan lokasi tempat parkir untuk mengembangkan retribusi daerah yang lebih optimal.
2. Memperkuat proses pemungutan, pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan suatu pengawasan perparkiran dan akan meningkatkan proses pemungutan retribusi dengan baik dan dengan melakukan pemungutan langsung Yang dikoordinir oleh koordinator lapangan. Bertujuan untuk memenuhi apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam memperkuat proses pemungutan retribusi. Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan tercapainya target dan realisasi yang sesuai dengan target yang di tentukan. Dengan demikian pencapaian retribusi daerah dari tahun 2016 sampai 2018 sudah optimal dengan baik.

3. Meningkatkan pengawasan, Dinas Perhubungan Melakukan suatu pelaksanaan pengawasan terhadap banyaknya aksi parkir liar yang tidak resmi di Kabupaten Gowa dan dinas perhubungan juga akan melakukan pendataan ulang terhadap juru parkir yang tidak resmi yang membuka lahan-lahan parkir yang ilegal pengawasan ini dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten gowa supaya tidak adanya kesempatan-kesempatan lagi terhadap juru parkir yang illegal, Karena dapat menyusahakan masyarakat.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan pemungutan sesuai perda dan besarnya tariff retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum itu ditetapkan jika kendaraan roda 2 tarifnya Rp.1000 rupiah sedangkan kendaraan roda 4 dengan tarif Rp.2000. meningkatkan efisiensi administrasi dengan cara meninjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.dengan dilakukannya peninjauan tariff retribusi parkir ditepi jalan umum.
5. Meningkatkan Kapasitas penerimaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan perencanaan kedepannya tentang suatu pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan untuk bisa dikelola dengan propesional , terkhususnya yang menegenai perparkiran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Diharapkan Perlunya pengawasan yang lebih tegas terhadap juru parkir liar yang berada di Kabupaten Gowa.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa mengevaluasi setiap program pemungutan Retribusi yang telah terealisasi dengan baik agar Kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi.
3. Diharapkan Juru Parkir tidak hanya sekedar menyeter suatu retribusi kepada dinas perhubungan tetapi juga ikut serta dalam suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh perda .



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Madani, Muhlis. 2016. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Makassar: Fisipol Unismuh Makassar.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Muluk, Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi kebijakan publik konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Siagian, Sondang p. 1994. *Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siagian, Sondang p. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siahaan, Marihot p. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber Data Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

Sumber Data BPS Kabupaten Gowa 2018

Peraturan:

Peraturan Daerah, "Undang-undang No 09 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan Umum.

Peraturan pemerintah, "Undang-undang No 58 tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. "Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajakk daerah dan retribusi Daerah".

Jurnal :

- Ali, Muhammad aidi. 2004. *Analisis Optimalisasi pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Kaltimgps.com di Samarinda*. Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis, volume 2. Nomor 2 .
- Azizah, Andi Nurul. 2016. *Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa*. Skripsi. Ekonomi. Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Bambang, Try. 2016. *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.
- Inggawati, Dwi Rezki. 2013. *Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pedapatan Asli Daerah*. Jurnal UNS. Vol 2.
- Sidik, Machfud. 2009. *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*. jurnal agora. vol 2.

Skripsi :

- Azizah, Andi Nurul. 2016. *Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa*. Skripsi. Ekonomi. Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Bambang, Try. 2016. *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.

L

A

M

P

I

R

A

N





Wawancara dengan Kepala Seksi Sarana & Prasarana Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa



Wawancara dengan Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa



Wawancara Juru Parkir



Wawancara Juru Parkir

RIWAYAT HIDUP



WAHYUNINGSI ABDULLAH, lahir di Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan , pada tanggal 29 Juni 1997. Anak Pertama dari Lima bersaudara dan merupakan buah cinta dan kasih dari pasangan Abdullah, SH, MH dan Nur Milu, SH, M.AP. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2009 di SD Negeri 1 Sungguminasa kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Mamuju dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 2015 di SMA Negeri 1 Mamuju . Berkat kerja keras dan doa orang tua, penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) pada tahun 2015 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Suatu kesyukuran bagi penulis dapat menuntut ilmu di perguruan tinggi Universtas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dan membahagiakan kedua orang tua dan keluarga serta dapat berguna bagi orang disekitar.